



Kebijakan Pengelolaan Wisata Alam Berbasis *Sustainable Tourism* dalam Mendukung Kelestarian Budaya Lokal

Didi Rusmidi^{1*}, Hendi Murtado Ilah¹

¹Universitas Sindang Kasih Majalengka

*Corresponding Author's e-mail: didirusmidi@uskm.ac.id

Article History:

Received: August 24, 2025

Revised: October 25, 2025

Accepted: October 31, 2025

Keywords:

public policy; nature tourism; terasering panyaweuyan; sustainable tourism; local culture

Abstract: *This study examines the Terasering Panyaweuyan nature tourist management policy, which emphasizes sustainable tourism, in an attempt to promote local cultural preservation. The present study employed a qualitative methodology, gathering data through observations, interviews, and documentation studies. Data analysis was demonstrated by considering community involvement, management strategies, and the effects on the environment and culture. Data reduction, data display, and conclusion drawing were the three interactive phases of this process. The findings indicate that this location has a lot of potential as a rural tourism destination, as evidenced by the steadily rising trend in annual visits. However, this increase is not offset by infrastructural preparation, which leads to problems with comfort, cleanliness, and environmental concerns. Local communities embrace tourists because they provide economic opportunities, but there are worries that the monetization of traditions may cause cultural values to shift. The proliferation of homestays and the rise in traders' salaries demonstrate the economic impact, notwithstanding the fact that advantages have not been dispersed equally. However, there are serious environmental issues with erosion, land degradation, and growing garbage volumes. Since community involvement in tourism management is still restricted to the consultation phase, improvements in cooperation and shared control are required.*

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Rusmidi, D., & Ilah, H. M. (2025). Kebijakan Pengelolaan Wisata Alam Berbasis Sustainable Tourism dalam Mendukung Kelestarian Budaya Lokal. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(10), 2489–2501. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i10.4525>

INTRODUCTION

Indonesia memiliki banyak sumber daya alam yang luar biasa dan banyak tempat wisata yang menawarkan keindahan alam dan keragaman budaya (Aurumajeda & Damayanti, 2023; Purba et al., 2024; Wijana & SS, 2025). Salah satu destinasi wisata alam yang menarik perhatian adalah Terasering Panyaweuyan yang terletak di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Kawasan ini terkenal dengan keindahan hamparan sawah bertingkat yang menawarkan panorama alam yang memukau. Selain sebagai daya tarik wisata, Terasering Panyaweuyan juga memiliki nilai budaya dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, pengelolaan wisata di kawasan ini harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan agar tetap lestari dan dapat memberikan banyak manfaat untuk masyarakat setempat.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fakta yang menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, sektor pariwisata mengalami pertumbuhan yang pesat (Ahmar et al., 2016; Aliansyah & Hermawan, 2019; Pambudi et al., 2020). Namun, di sisi lain, tanpa pengelolaan yang baik, dampak negatif terhadap lingkungan dan budaya lokal dapat terjadi. Peningkatan jumlah wisatawan dapat menyebabkan degradasi lingkungan, perubahan sosial-budaya, serta ketidakseimbangan ekonomi bagi masyarakat sekitar (Hutajulu et al., 2024; Mahendra et al., 2023; Ni'am Laksono & Mussadun, 2014; Rhama, 2019). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pengelolaan wisata yang berbasis sustainable tourism guna menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keberlanjutan budaya lokal.

Konsep sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan menekankan pentingnya pengelolaan destinasi wisata yang bertanggung jawab terhadap aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi (Adnyana, 2020; Iqbal, 2022; Permatasari, 2022; Widiati & Permatasari, 2022). Dalam konteks Terasering Panyaweuyan, penerapan kebijakan berbasis sustainable tourism diharapkan mampu menjaga kelestarian alam serta memberdayakan masyarakat lokal. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals - SDGs) yang mencakup aspek keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian warisan budaya (Adebimpe Bolatito Ige et al., 2024; Biermann et al., 2022; Henderson & Loreau, 2023; Kasinathan et al., 2022; Serafini et al., 2022).

Saat ini, kebijakan pengelolaan wisata alam di Indonesia umumnya masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, keterbatasan regulasi yang jelas, hingga rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata (Hunihua, 2023; Nurhidayati et al., 2025; Toruan et al., 2025). Di Terasering Panyaweuyan, tantangan yang dihadapi antara lain adalah peningkatan jumlah wisatawan yang tidak diimbangi dengan fasilitas yang memadai, kurangnya kesadaran wisatawan terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan, serta potensi perubahan sosial akibat pengaruh budaya luar.

Keberadaan Terasering Panyaweuyan sebagai destinasi wisata unggulan di Majalengka memberikan peluang bagi peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Namun, apabila tidak dikelola dengan baik, keberlanjutan kawasan ini dapat terancam. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan wisata yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi menjadi hal yang sangat penting (Alfiandri et al., 2024; Dhahiyat et al., 2025; Kurniawan, 2024; Suwita, 2025). Beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan wisata berbasis sustainable tourism di antaranya adalah penerapan regulasi yang jelas, edukasi bagi wisatawan dan masyarakat, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengelola destinasi wisata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kebijakan pengelolaan wisata alam Terasering Panyaweuyan yang berfokus pada pariwisata berkelanjutan mendukung kelestarian budaya lokal. Penting bagi penelitian ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tata kelola kebijakan yang telah diterapkan, masalah yang dihadapi, dan saran untuk meningkatkan pengelolaan wisata. Ini termasuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan yang ada telah membantu keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya lokal.

Untuk mendukung upaya pelestarian budaya lokal, dalam konteks tata kelola wisata, salah satu yang dapat diterapkan adalah pengelolaan berbasis Sustainable Tourism. Melalui konsep ini, maka tata kelola wisata Terasering Panyaweuyan semestinya dikelola dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Berdasarkan latar

belakang tersebut, peneliti merumuskan masalah penelitian, yaitu: Bagaimana kebijakan pengelolaan wisata alam Terasering Panyaweuyan berbasis Sustainable Tourism dalam Mendukung Kelestarian Budaya Lokal? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengelolaan wisata alam Terasering Panyaweuyan berbasis sustainable tourism dalam mendukung kelestarian budaya local. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pengembangan wisata alam berbasis sustainable tourism di daerah lain di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan pariwisata dapat terus berkembang tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan nilai-nilai budaya yang telah ada sejak lama.

Beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini telah banyak dilakukan. Pentingnya tata kelola yang baik dalam konteks kebijakan publik (Dhahiyat et al., 2025; Kurniawan, 2024; Rusmidi, 2022; Suwita, 2025), tata kelola wisata berkelanjutan (Permatasari, 2022; Yardı & Aksöz, 2023), dan upaya merawat budaya local sebagai bentuk kearifan lokal Masyarakat (Iakovaki et al., 2023; Iqbal, 2022; Kan, 2022). Penelitian ini melengkapi analisis kebijakan pengelolaan wisata alam Terasering Panyaweuyan yang berfokus pada wisata hijau yang belum banyak diteliti secara menyeluruh. Fokus penelitian ini mencakup pendekatan multidimensi yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan budaya lokal secara holistik. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan serta mengidentifikasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan wisata, yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya.

LANDASAN TEORI

Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism)

Pariwisata berkelanjutan menekankan pengelolaan destinasi wisata dengan mempertimbangkan keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan. Tujuannya adalah menciptakan pengalaman wisata yang bermanfaat tanpa merusak potensi alam maupun budaya lokal, sehingga dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Prinsip ini diakui oleh United Nations World Tourism Organization (UNWTO) sebagai fondasi pembangunan pariwisata global (Seraphin & Gowreesunkar, 2021; Wayne & Frechtling, 2024).

Kebijakan Publik

Kebijakan publik dipahami sebagai keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Birkland (2019) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan". Quadri (2020) menjelaskan siklus kebijakan yang meliputi perumusan masalah, agenda setting, formulasi, implementasi, dan evaluasi. Teori ini penting untuk menilai efektivitas kebijakan pengelolaan pariwisata.

Pengelolaan Destinasi Pariwisata

Butler (2011) memperkenalkan *Tourism Area Life Cycle (TALC)* yang menggambarkan tahapan perkembangan destinasi wisata: eksplorasi, keterlibatan, pengembangan, konsolidasi, stagnasi, serta penurunan atau rekonstruksi. Teori ini membantu memetakan posisi suatu destinasi dalam siklus pertumbuhannya, sehingga strategi pengelolaan dapat disesuaikan (Butler, 2025).

Kelestarian Budaya Lokal (Cultural Sustainability)

Throsby (1995) menekankan bahwa budaya merupakan pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan, selain aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Warisan budaya lokal adalah aset yang perlu dijaga melalui kebijakan yang inklusif dan partisipatif.

Teori ini menegaskan bahwa pelestarian budaya harus menjadi bagian integral dari kebijakan pariwisata (Wiktor-Mach, 2020).

Partisipasi Masyarakat

Arnstein (1969) melalui *Ladder of Citizen Participation* menggambarkan delapan tingkatan partisipasi masyarakat, mulai dari manipulasi, terapi, konsultasi, hingga citizen control. Teori ini menekankan pentingnya keterlibatan nyata masyarakat dalam pengambilan keputusan, bukan sekadar simbolik. Dalam konteks pariwisata, teori ini berguna untuk menilai sejauh mana masyarakat lokal dilibatkan dalam kebijakan (Dangi & Petrick, 2021; Reindrawati, 2023).

Community-Based Tourism (CBT)

Community-Based Tourism (CBT) berfokus pada partisipasi aktif masyarakat lokal dalam mengelola destinasi wisata. Prinsipnya adalah pariwisata harus memberikan manfaat langsung pada masyarakat, menjaga budaya, dan melestarikan lingkungan. Model ini sejalan dengan pendekatan pariwisata berkelanjutan dan memperkuat identitas lokal (Krittayaruangroj et al., 2023; Walia, 2021).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan pemilihan partisipan menggunakan pendekatan purposive sampling. Penelitian ini dilakukan di Terasering Panyaweuyan Majalengka, dengan fokus pada kajian *Sustainable Tourism*, melalui tiga aspek: sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan. Pemilihan subyek didasarkan pada pertimbangan peneliti bahwa informan tersebut memiliki pengetahuan atau informasi yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Analisis data dilakukan secara interaktif dalam tiga tahap: (1) pengurangan data; (2) penyebaran data; dan (3) penarikan kesimpulan; setelah itu, temuan divalidasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terasering Panyaweuyan di Majalengka merupakan destinasi wisata yang menampilkan panorama sawah bertingkat dengan nilai estetik tinggi sekaligus merepresentasikan kearifan lokal masyarakat agraris. Berdasarkan observasi lapangan, area ini menerima rata-rata 1.200–1.500 kunjungan wisatawan per minggu pada musim libur panjang, dengan tren peningkatan kunjungan sebesar 20% per tahun sejak 2021 (Dinas Pariwisata & Kebudayaan, 2024). Namun, peningkatan kunjungan ini belum diimbangi dengan sarana pendukung. Berdasarkan catatan lapangan, fasilitas seperti tempat sampah, jalur pedestrian, dan pusat informasi wisata masih terbatas. Hal ini berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan dan berkurangnya kenyamanan wisatawan.

Seorang pengelola lokal menyampaikan dalam wawancara:

“Wisatawan makin banyak, apalagi pas akhir pekan, tapi masalahnya sampah sering menumpuk dan fasilitas toilet sangat kurang. Kadang kami yang harus turun tangan membersihkan, padahal bukan tugas utama kami.” (Wawancara, Pengelola, 12 Juli 2025).

Aspek Sosial dan Budaya

Ditinjau dari aspek sosial-budaya, hasil wawancara dengan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menerima keberadaan wisatawan karena membawa peluang ekonomi. Akan tetapi, terdapat kekhawatiran mengenai pengaruh budaya luar terhadap generasi muda.

“Sekarang anak-anak muda lebih sering bertemu turis dan terpapar gaya hidup mereka. Bagus karena menambah wawasan, tapi ada juga kekhawatiran kalau budaya asli kita jadi hilang.” (Wawancara, Tokoh, 19 Juli 2025).

Selain itu, beberapa tradisi lokal, seperti upacara syukuran panen, kini mulai dijadikan atraksi wisata. Hal ini dinilai positif sebagai sarana promosi budaya, tetapi berisiko menggeser makna sakral dari tradisi tersebut. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat lokal umumnya menerima keberadaan wisatawan karena memberikan peluang ekonomi baru. Namun, terdapat ambivalensi terhadap dampak budaya yang muncul. Tokoh masyarakat menyampaikan kekhawatiran akan lunturnya nilai-nilai tradisi akibat interaksi intens dengan wisatawan.

Fenomena ini menggambarkan proses *cultural commodification* (Greenwood, 1991), yaitu perubahan makna budaya ketika dijadikan komoditas pariwisata. Misalnya, tradisi syukuran panen kini dikemas sebagai atraksi wisata. Meskipun efektif dalam promosi budaya (Richards, 2018), hal ini berpotensi menggeser makna sakral upacara menjadi sekadar tontonan (Aslan & Pugu, 2025).

Untuk mengatasi dilema tersebut, penerapan konsep *Community-Based Tourism* (CBT) menjadi relevan (Walia, 2021). CBT memungkinkan masyarakat mengontrol bagaimana budaya mereka direpresentasikan, menjaga keseimbangan antara pelestarian dan komersialisasi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas masyarakat dalam perancangan atraksi berbasis tradisi perlu menjadi prioritas kebijakan.

Aspek Ekonomi

Dari sisi ekonomi, pariwisata di Panyaweuyan memberikan dampak positif nyata. Data wawancara menunjukkan rata-rata pendapatan pedagang makanan meningkat 30–40% sejak kawasan ini berkembang sebagai destinasi wisata. *Homestay* yang dikelola masyarakat juga mulai tumbuh, meski kapasitas masih terbatas.

Seorang pelaku usaha lokal mengatakan:

“Sejak banyak turis datang, warung saya lebih ramai. Kalau dulu sehari paling untung 100 ribu, sekarang bisa dua kali lipat.” (Wawancara, Pedagang Lokal, 19 Juli 2025).

Namun, distribusi manfaat ekonomi belum merata. Beberapa warga yang tidak memiliki keterlibatan langsung dalam kegiatan wisata merasa tidak mendapatkan keuntungan yang signifikan. Model pengelolaan partisipatif sebagaimana disarankan Reindrawati (2023) dan Wondirad et al. (2024) perlu diterapkan untuk mendorong keadilan ekonomi lokal. Diversifikasi usaha seperti pengembangan produk pertanian olahan, kerajinan tangan, serta wisata edukatif dapat memperluas peluang ekonomi bagi masyarakat yang belum terlibat langsung.

Aspek Lingkungan

Secara ekologis, kawasan ini menghadapi tekanan serius. Dampak negatif terlihat pada peningkatan volume sampah dan perubahan lahan. Berdasarkan dokumentasi lapangan, sekitar 15% area terasering mengalami tekanan karena pembangunan jalur akses wisata yang tidak sesuai kaidah konservasi. Erosi tanah di beberapa titik juga mulai terlihat.

“Kalau musim hujan, jalur ke sawah jadi licin dan tanah gampang longsor karena banyak pengunjung lewat tanpa jalur khusus.” (Wawancara, Petani Lokal, 12 Juli 2025).

Model pengelolaan partisipatif sebagaimana disarankan Reindrawati (2023) dan Wondirad et al. (2024) perlu diterapkan untuk mendorong keadilan ekonomi lokal. Diversifikasi usaha seperti pengembangan produk pertanian olahan, kerajinan tangan,

serta wisata edukatif dapat memperluas peluang ekonomi bagi masyarakat yang belum terlibat langsung.

Upaya pelestarian lingkungan sudah dilakukan melalui program penanaman pohon di sekitar area terasering, tetapi partisipasi wisatawan masih rendah. Kondisi ini menegaskan pentingnya pendekatan triple bottom line (Bhatti et al., 2025; Birkel & Müller, 2021), yaitu menjaga keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai syarat keberlanjutan. Jika aspek ekologis diabaikan, maka manfaat ekonomi jangka pendek akan mengorbankan daya dukung lingkungan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Purba et al. (2024) dan Saragih et al. (2024) yang menunjukkan bahwa pariwisata tanpa regulasi konservasi menyebabkan kerusakan lahan dan penurunan kualitas ekosistem. Oleh karena itu, strategi seperti reboisasi, penataan jalur wisata, dan manajemen sampah terpadu perlu diperkuat.

Selain itu, edukasi wisatawan menjadi kunci keberhasilan konservasi. Wijana & SS (2025) menegaskan bahwa partisipasi pengunjung memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan pelestarian lingkungan. Implementasi ekowisata berbasis edukasi dan penegakan aturan lingkungan dapat menjadi instrumen efektif menjaga keberlanjutan kawasan.

Aspek Partisipasi Masyarakat

Pada aspek partisipasi masyarakat, menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat masih berada pada tahap konsultasi, belum sampai pada tahap *citizen control* sebagaimana digambarkan dalam teori (Arnstein, 1969). Keputusan strategis lebih banyak ditentukan oleh pemerintah daerah dan pengelola wisata formal.

Beberapa warga berharap bisa lebih dilibatkan:

“Kami ingin suara kami didengar dalam pengelolaan. Kadang ada kebijakan baru, tapi kami hanya diberitahu setelah ditetapkan.” (Wawancara, Warga Lokal, 19 Juli 2025).

Meskipun begitu, masyarakat tetap berperan aktif dalam kegiatan operasional harian seperti menjaga kebersihan, mengelola warung, dan menjadi pemandu lokal. Keterbatasan ini berpotensi mengurangi rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap destinasi. Tosun (2006) menyebut hambatan partisipasi di negara berkembang umumnya terkait dominasi pemerintah dan keterbatasan kapasitas SDM lokal.

Untuk memperkuat peran masyarakat, diperlukan pendekatan *collaborative governance* (Jamal & Stronza, 2009). Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dapat meningkatkan legitimasi kebijakan serta pemerataan manfaat. Pembentukan forum musyawarah desa, koperasi wisata, atau kelompok sadar wisata merupakan langkah strategis menuju partisipasi yang lebih substantif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terasering Panyaweuyan mengalami peningkatan jumlah wisatawan secara signifikan, mencapai 1.200–1.500 kunjungan per minggu pada musim liburan panjang. Kenaikan 20% per tahun sejak 2021 (Dinas Pariwisata & Kebudayaan, 2024) menggambarkan potensi besar dalam sektor pariwisata pedesaan. Namun, keterbatasan sarana seperti toilet, tempat sampah, dan jalur pedestrian menimbulkan persoalan serius. Kondisi ini sesuai dengan konsep *Tourism Area Life Cycle (TALC)* dari Butler (2011) yang menjelaskan bahwa setiap destinasi melalui tahapan eksplorasi, pengembangan, hingga stagnasi. Panyaweuyan saat ini berada dalam tahap pengembangan, di mana jumlah kunjungan meningkat cepat tetapi belum diiringi manajemen memadai. Jika tidak ditangani, kawasan berpotensi menghadapi masalah lingkungan dan penurunan kualitas wisata.

Penelitian Ardiansyah & Julianto (2023) menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur menentukan kepuasan wisatawan sekaligus mendukung prinsip keberlanjutan. Masalah infrastruktur juga terjadi ketika tingginya kunjungan menyebabkan persoalan sampah dan kerusakan lanskap (Laksmi, 2025). Hal ini menunjukkan urgensi pengelolaan berbasis *carrying capacity* agar tekanan wisatawan tidak merusak ekosistem.

Penerimaan masyarakat terhadap wisatawan di Panyaweuyan bersifat ambivalen. Di satu sisi, interaksi dengan wisatawan memperluas wawasan dan peluang ekonomi; di sisi lain, terdapat kekhawatiran akan hilangnya nilai budaya asli. Kekhawatiran ini dapat dipahami melalui konsep *cultural commodification* (Greenwood, 1991), yaitu perubahan makna budaya ketika diproduksi sebagai komoditas pariwisata.

Tradisi syukuran panen yang dijadikan atraksi wisata memiliki nilai ganda. Dari sisi positif, hal ini memperkuat promosi budaya lokal dan menambah daya tarik wisata (Richards, 2018). Namun, dari sisi negatif, terdapat risiko bergesernya makna sakral tradisi dan menjadikannya sekadar tontonan (Aslan & Pugu, 2025). Fenomena ritual budaya yang dikemas untuk pariwisata, memunculkan dilema antara pelestarian dan komersialisasi (Ginting et al., 2025)

Untuk mengatasi masalah ini, konsep *Community-Based Tourism (CBT)* relevan diterapkan. CBT memungkinkan masyarakat menentukan bagaimana budaya mereka ditampilkan sehingga makna asli tetap terjaga (Walia, 2021). Dengan demikian, masyarakat Panyaweuyan perlu dilibatkan dalam perancangan atraksi budaya agar tradisi tetap otentik.

Secara ekonomi, pariwisata membawa dampak positif signifikan. Pendapatan pedagang meningkat hingga 40%, dan usaha homestay mulai berkembang meskipun kapasitas masih terbatas. Temuan ini mendukung teori *multiplier effect* pariwisata, di mana aktivitas wisata memicu pertumbuhan sektor terkait seperti perdagangan, transportasi, dan jasa (Aditama & Wayan, 2024; Ayu & Silalahi, 2023). Namun, distribusi manfaat ekonomi belum merata. Hanya masyarakat yang terlibat langsung sebagai pedagang, pengelola homestay, atau pemandu yang merasakan keuntungan. Warga lain cenderung tertinggal. Situasi ini sejalan dengan analisis Asy'ari et al., (2021), yang menyatakan bahwa pariwisata berbasis masyarakat harus diukur tidak hanya dari peningkatan pendapatan, tetapi juga pemerataan manfaat.

Reindrawati (2023 dan Wondirad et al., (2024) menegaskan pentingnya model pengelolaan partisipatif untuk mendorong distribusi ekonomi yang lebih adil. Dalam konteks Panyaweuyan, peluang diversifikasi usaha seperti produk pertanian olahan, kerajinan tangan, serta jasa wisata edukatif dapat diperluas agar manfaat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Aspek lingkungan menunjukkan adanya tantangan besar. Sekitar 15% area terasering mengalami degradasi akibat pembangunan jalur wisata yang tidak sesuai dengan prinsip konservasi. Masalah erosi tanah juga muncul, terutama di musim hujan ketika jalur sering dilalui wisatawan tanpa jalur khusus. Hal ini menegaskan relevansi konsep *triple bottom line*, yang menyatakan bahwa keberlanjutan hanya dapat tercapai jika keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan dijaga (Bhatti et al., 2025; Birkel & Müller, 2021). Jika aspek lingkungan diabaikan, pariwisata akan menciptakan dampak negatif jangka panjang.

Penelitian Purba et al., (2024) dan Saragih et al., (2024) menunjukkan bahwa pengembangan wisata sering kali mengabaikan aspek ekologi, sehingga menimbulkan kerusakan lahan. Oleh karena itu, strategi berbasis konservasi seperti reboisasi, pengaturan

jalur khusus, dan manajemen sampah terpadu harus diperkuat. Selain itu, kesadaran wisatawan perlu ditingkatkan. Penelitian Wijana & SS (2025) menegaskan bahwa keberhasilan konservasi sangat dipengaruhi oleh partisipasi pengunjung. Edukasi berbasis ekowisata, kampanye lingkungan, dan penerapan regulasi tegas akan mendukung pelestarian Panyaweuyan.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Panyaweuyan masih berada pada tahap konsultasi menurut tangga partisipasi (Arnstein, 1969). Artinya, masyarakat dilibatkan secara terbatas dan tidak memiliki kendali dalam pengambilan keputusan strategis. Kondisi ini dapat mengurangi rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap destinasi wisata. Tosun (2006) mengidentifikasi hambatan partisipasi di negara berkembang, seperti dominasi pemerintah, keterbatasan akses informasi, dan lemahnya kapasitas SDM lokal. Hal ini juga terlihat di Panyaweuyan, di mana keputusan strategis lebih banyak ditentukan oleh pemerintah daerah.

Untuk meningkatkan peran masyarakat, diperlukan *collaborative governance*. Jamal & Stronza (2009) menekankan bahwa mekanisme kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dapat memperkuat legitimasi kebijakan sekaligus pemerataan manfaat. Forum musyawarah desa, koperasi wisata, atau kelompok sadar wisata bisa menjadi wadah partisipasi yang lebih kuat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa Terasering Panyaweuyan memiliki potensi strategis sebagai model pengembangan sustainable rural tourism berbasis kearifan lokal. Temuan menunjukkan bahwa keberlanjutan destinasi ini bergantung pada sinergi antara dimensi sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan partisipasi masyarakat. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur tentang pengelolaan wisata alam di kawasan pedesaan dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian nilai lokal. Secara praktis, hasil penelitian memberikan implikasi kebijakan bagi pemerintah daerah dan pengelola wisata untuk: (1) memperkuat infrastruktur ramah lingkungan; (2) melindungi warisan budaya dari komodifikasi berlebihan melalui regulasi dan peran aktif komunitas; (3) memastikan pemerataan manfaat ekonomi dengan mendukung usaha mikro dan koperasi desa; (4) menerapkan konservasi terpadu untuk menjaga daya dukung lahan; dan (5) menginstitutionalisasi partisipasi masyarakat dalam tata kelola destinasi melalui model kolaboratif berbasis kemitraan. Dengan pendekatan tersebut, Terasering Panyaweuyan dapat menjadi contoh praktik baik (*best practice*) dalam implementasi kebijakan pariwisata berkelanjutan di tingkat lokal, yang sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sektor pariwisata.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi penting selama proses penelitian ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) atas dukungannya terhadap penelitian ini melalui hibah penelitian yang diberikan pada skema Penelitian Dosen Pemula tahun 2025, dengan nomor kontrak 125/C3/DT.05.00/PL/2025.

DAFTAR REFERENSI

- Adebimpe Bolatito Ige, Eseoghene Kupa, & Oluwatosin Ilori. (2024). Aligning sustainable development goals with cybersecurity strategies: Ensuring a secure and sustainable future. *GSC Advanced Research and Reviews*, 19(3), 344–360. <https://doi.org/10.30574/gscarr.2024.19.3.0236>
- Aditama, N. M., & Wayan, M. I. (2024). Analisis Dampak Ekonomi Berganda (Multiplier Effect) Pariwisata terhadap Pelaku Usaha dan Pekerja di Pantai Pandawa, Bali. *Journal of Tourism and Hospitality Analysis (JoTHA)*, 1(1), 31–40.
- Adnyana, I. M. (2020). Dampak green tourism bagi pariwisata berkelanjutan pada era revolusi industri 4.0. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(3), 1582–1592.
- Ahmar, A., Nurlinda, N., & Muhani, M. (2016). Peranan sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Palopo. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1).
- Alfiandri, A., Septiawan, A., Basalamah, R. H., Rivai, N. I., Poti, J., & Azizi, O. R. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Desa Wisata Alam Mandiri di Daerah Pesisir (Studi Pengelolaan Ekowisata Mangrove Desa Pengudang Kabupaten Bintan). *Takzim: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 17–27.
- Aliansyah, H., & Hermawan, W. (2019). Peran sektor pariwisata pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Bina Ekonomi*, 23(1), 39–55.
- Ardiansyah, I., & Julianto, E. (2023). Persepsi Wisatawan Terhadap Infrastruktur Wisata Pasca Revitalisasi Kawasan Kota Tua Jakarta. *Jurnal Manajemen Perhotelan Dan Pariwisata*, 6(1), 194–206. <https://doi.org/10.23887/jmpp.v6i1.57879>
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Aslan, A., & Pugu, M. R. (2025). Pergeseran Makna Religius: Pengaruh Interaksi Budaya Global Terhadap Tradisi Lokal. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), 158–168.
- Asy'ari, R., Tahir, R., Rakhman, C. U., & Putra, R. R. (2021). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 8(1), 47. <https://doi.org/10.24036/scs.v8i1.292>
- Aurumajeda, T., & Damayanti, A. (2023). Estetika Nusantara Pada Logo Pesona Indonesia. *Kreatif: Jurnal Karya Tulis, Rupa, Eksperimental Dan Inovatif*, 5(1), 1–5.
- Ayu, P., & Silalahi, W. P. (2023). Analisis Multiplier Effect Pariwisata F1H2O bagi Masyarakat Kawasan Danau Toba, Balige. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2(3).
- Bhatti, A. A., Rehman, J., Shamsi, M. I., & Shamim, K. (2025). Triple Bottom-Line: A Critical Review and Need for Strategic Renewal. *Pakistan Business Review*, 27(1), 1–28. <https://doi.org/10.22555/pbr.v27i1.1368>
- Biermann, F., Hickmann, T., Sénit, C.-A., Beisheim, M., Bernstein, S., Chasek, P., Grob, L., Kim, R. E., Kotzé, L. J., Nilsson, M., Ordóñez Llanos, A., Okereke, C., Pradhan, P., Raven, R., Sun, Y., Vijge, M. J., van Vuuren, D., & Wicke, B. (2022). Scientific evidence on the political impact of the Sustainable Development Goals. *Nature Sustainability*, 5(9), 795–800. <https://doi.org/10.1038/s41893-022-00909-5>
- Birkel, H., & Müller, J. M. (2021). Potentials of industry 4.0 for supply chain management within the triple bottom line of sustainability – A systematic literature review. *Journal of Cleaner Production*, 289, 125612. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125612>
- Birkland, T. A. (2019). *An Introduction to the Policy Process*. Routledge.

- <https://doi.org/10.4324/9781351023948>
- Butler, R. (2011). *Tourism Area Lifecycle*. Goodfellow Publishers CN - HD. <http://digital.casalini.it/9781906884338>
- Butler, R. (2025). Tourism destination development: the tourism area life cycle model. *Tourism Geographies*, 27(3–4), 599–607. <https://doi.org/10.1080/14616688.2024.2325932>
- Dangi, T. B., & Petrick, J. F. (2021). Enhancing the role of tourism governance to improve collaborative participation, responsiveness, representation and inclusion for sustainable community-based tourism: a case study. *International Journal of Tourism Cities*, 7(4), 1029–1048. <https://doi.org/10.1108/IJTC-10-2020-0223>
- Dhahiyat, A. P., Kristiadhi, F., Junirahma, N. S., & Annida, S. B. (2025). Gagasan Kebijakan Dukungan Pembangunan Pariwisata Bahari Di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. *TOBA: Journal of Tourism, Hospitality, and Destination*, 4(1), 27–32.
- Dinas Pariwisata & Kebudayaan. (2024). *Jumlah Kunjungan Potensi Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) Berdasarkan Objek Daya Tarik Wisata di Kabupaten Majalengka*. <https://opendata.majalengkakab.go.id/dataset/jumlah-kunjungan-potensi-objek-daya-tarik-wisata-odtw-berdasarkan-objek-daya-tarik-wisata-di-kabupaten-majalengka-2>
- Ginting, H. I., Suryadi, M. I., Fadlurrahman, M. R. W., Boli, T. P., & Putra, B. D. (2025). Komersialisasi dalam Pengelolaan Destinasi Warisan Budaya: Praktik dan Tantangan di Saung Angklung Udjo. *Nazharat: Jurnal Kebudayaan*, 31(1), 9–20.
- Greenwood, C. R. (1991). Classwide peer tutoring: Longitudinal effects on the reading, language, and mathematics achievement of at-risk students. *Reading, Writing, and Learning Disabilities*, 7(2), 105–123.
- Henderson, K., & Loreau, M. (2023). A model of Sustainable Development Goals: Challenges and opportunities in promoting human well-being and environmental sustainability. *Ecological Modelling*, 475, 110164. <https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2022.110164>
- Hunihua, R. I. (2023). Strategi Pengembangan Pariwisata Hijau: Urgensi Regulasi dan Sinergi Multisektoral di Kota Ambon. *Populis: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 16(1), 85–103.
- Hutajulu, H., Runtunuwu, P. C. H., Judijanto, L., Ilma, A. F. N., Ermanda, A. P., Fitriyana, F., Mudjiyanti, R., Maichal, M., Boari, Y., & Laksono, R. D. (2024). *Sustainable Economic Development: Teori dan Landasan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Multi Sektor di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Iakovaki, E., Konstantakis, M., Teneketzis, A., & Konstantakis, G. (2023). Analyzing Cultural Routes and Their Role in Advancing Cultural Heritage Management within Tourism: A Systematic Review with a Focus on the Integration of Digital Technologies. *Encyclopedia*, 3(4), 1509–1522. <https://doi.org/10.3390/encyclopedia3040108>
- Iqbal, M. (2022). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata melalui Konsep Community Based Tourism dan Sustainable Tourism. *AT TAMKIN: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2(1), 9–27.
- Jamal, T., & Stronza, A. (2009). Collaboration theory and tourism practice in protected areas: stakeholders, structuring and sustainability. *Journal of Sustainable Tourism*, 17(2), 169–189. <https://doi.org/10.1080/09669580802495741>

- Kan, Y. (2022). Research on Confucian Cultural Tourism Development under the Background of Cultural and Tourism Integration. *Learning & Education*, 10(5), 238. <https://doi.org/10.18282/l-e.v10i5.2756>
- Kasinathan, P., Pugazhendhi, R., Elavarasan, R. M., Ramachandaramurthy, V. K., Ramanathan, V., Subramanian, S., Kumar, S., Nandhagopal, K., Raghavan, R. R. V., Rangasamy, S., Devendiran, R., & Alsharif, M. H. (2022). Realization of Sustainable Development Goals with Disruptive Technologies by Integrating Industry 5.0, Society 5.0, Smart Cities and Villages. *Sustainability*, 14(22), 15258. <https://doi.org/10.3390/su142215258>
- Krittayaruangroj, K., Suriyankietkaew, S., & Hallinger, P. (2023). Research on sustainability in community-based tourism: a bibliometric review and future directions. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 28(9), 1031–1051. <https://doi.org/10.1080/10941665.2023.2276477>
- Kurniawan, R. (2024). Strategi Pemasaran Pendekatan Model Pariwisata Berkelanjutan di Kota Cinta Habibie Ainun Pare-Pare. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(3), 1349–1357.
- Laksmi, G. W. (2025). Perencanaan Strategi Pariwisata Ekowisata Regional Sebagai Solusi Pengelolaan Sampah (Studi Kasus: Taman Nasional Laut Bunaken). *Perencanaan Strategis Pengembangan Pariwisata Regional*, 132.
- Mahendra, Y., Wulandari, G., & Lilis, L. (2023). Perubahan Sosial Budaya Suku Baduy Luar: Sebuah Analisis Interaksi Antara Tradisi Dan Modernitas. *Jurnal Anak Bangsa*, 2(2), 215–225.
- Ni'am Laksono, A., & Mussadun, M. (2014). Dampak aktivitas ekowisata di Pulau Karimunjawa berdasarkan persepsi masyarakat. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 3(2), 262–273.
- Nurhidayati, S. E., Muliani, L., Judijanto, L., Apriyanto, A., Haryanti, T., Darmayasa, D., Haryani, H., Rohmah, I. Y., Hadiati, M. S., & Arifiyanti, A. A. (2025). *Pesona Pariwisata Indonesia: Potensi, Pengembangan, dan Inovasi Membangun Destinasi Pariwisata Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Pambudi, A. S., Masteriarsa, M. F., Wibowo, A. D. C., Amaliyah, I., & Ardana, A. K. (2020). Strategi pemulihan ekonomi sektor pariwisata pasca Covid-19. *Majalah Media Perencana*, 1(1), 1–21.
- Permatasari, I. (2022). Peran model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (Community based tourism) dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan (Sustainable tourism) di Bali. *Kertha Wicaksana*, 16(2), 164–171.
- Purba, B., Situmorang, E. A. A., Firmansyah, D., & Manurung, T. A. (2024). Potensi Sumber Daya Alam dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata di Indonesia. *Economic Reviews Journal*, 3(3), 2060–2065.
- Quadri, M. O. (2020). Public Policy and Politics. In *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance* (pp. 1–8). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5_187-1
- Reindrawati, D. Y. (2023). Challenges of community participation in tourism planning in developing countries. *Cogent Social Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2164240>
- Rhama, B. (2019). Peluang ekowisata dalam industri 4.0 di Indonesia. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 8(2), 1–13.
- Richards, G. (2018). Cultural tourism: A review of recent research and trends. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 36, 12–21.

- <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2018.03.005>
- Rusmidi, D. (2022). *Pengaruh Pemberdayaan Pegawai dan Budaya Organisasi Terhadap Kualitas Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka* (Vol. 1, Issue 1). <https://doi.org/https://doi.org/10.54213/tanzhimuna.v2i02.203>
- Saragih, J. R., Riadi, R., Saragih, R., Purba, T., Sidabukke, S. H., Simarmata, M. M., Sinaga, R., Triastuti, & Chalik, A. A. (2024). Assessing Tourism Object Management Towards Sustainable Tourism Development Strategy: A SWOT Analysis. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 19(8), 3235–3245. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.190835>
- Serafini, P. G., Moura, J. M. de, Almeida, M. R. de, & Rezende, J. F. D. de. (2022). Sustainable Development Goals in Higher Education Institutions: A systematic literature review. *Journal of Cleaner Production*, 370, 133473. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.133473>
- Seraphin, H., & Gowreesunkar, V. G. B. (2021). Tourism: how to achieve the sustainable development goals? *Worldwide Hospitality and Tourism Themes*, 13(1), 3–8. <https://doi.org/10.1108/WHATT-08-2020-0086>
- Suwita, D. A. I. (2025). Kontroversi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Pariwisata Alam: Studi Kasus UU Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di Sektor Pariwisata Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(2), 3060–3074.
- Throsby, D. (1995). Culture, economics and sustainability. *Journal of Cultural Economics*, 19(3), 199–206. <https://doi.org/10.1007/BF01074049>
- Toruan, R. R. M. L., Wiyati, E. K., & Meliala, Y. H. (2025). Komunikasi Pemangku Kepentingan melalui Koordinasi dalam Pengembangan Pariwisata Danau Toba, Sumatera Utara. *Jurnal Communio: Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi*, 14(1), 59–74.
- Tosun, C. (2006). Expected nature of community participation in tourism development. *Tourism Management*, 27(3), 493–504. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2004.12.004>
- Walia, S. K. (2021). *The routledge handbook of community-based tourism management*. Routledge.
- Wayne, S., & Frechtling, D. C. (2024). Sustainable Development Goals (UN). In *Encyclopedia of Tourism* (pp. 1018–1020). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-030-74923-1_795
- Widiati, I. A. P., & Permatasari, I. (2022). Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism Development) Berbasis Lingkungan Pada Fasilitas Penunjang Pariwisata di Kabupaten Badung. *Kertha Wicaksana*, 16(1), 35–44.
- Wijana, P. A., & SS, M. P. (2025). Kekayaan Alam, Budaya Dan Sejarah. *PENGANTAR PARIWISATA DI INDONESIA*, 45.
- Wiktor-Mach, D. (2020). What role for culture in the age of sustainable development? UNESCO's advocacy in the 2030 Agenda negotiations. *International Journal of Cultural Policy*, 26(3), 312–327. <https://doi.org/10.1080/10286632.2018.1534841>
- Wondirad, A., Ma, Y., & Tolkach, D. (2024). Tourism governance in the new normal: lessons for Eastern Africa. *Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events*, 1–14. <https://doi.org/10.1080/19407963.2024.2381730>
- Yardı, Z., & Aksöz, E. O. (2023). Strategic Leadership in Tourism Enterprises. *Leadership Approaches in Global Hospitality and Tourism*, 199–217. <https://doi.org/10.4018/978-1->

6684-6713-8.ch011